

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2025



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
2026**

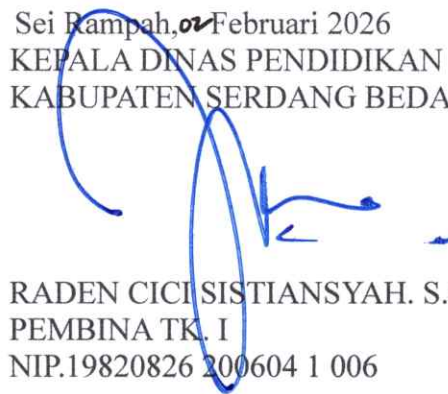
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 disusun berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025. LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta penyampaian secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan masyarakat secara keseluruhan.

Sei Rampah, 02 Februari 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



RADEN CICI SISTIANSYAH. S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP.19820826 200604 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.3 Dasar Hukum	5
1.4 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Tujuan dan Sasaran	7
2.2 Rencana Kerja Tahun 2025	8
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
2.4 Indikator Kinerja Utama, Standar Pelayanan Publik (SPM) dan IKK.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 KERANGKA Pengukuran Kinerja	24
3.2 Capaian Kinerja	26
3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	26
3.2.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	32
3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	35
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	37
3.5 Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran	39
3.6 Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Atas Capaian Kinerja	42
3.7 Akuntabilitas Keuangan	42
BAB IV PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan	7
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan	7
Tabel 2. 3 Rincian Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2025.....	9
Tabel 2. 4 Target Indikator Kinerja Utama	11
Tabel 2. 5 Target Indikator Spm Sesuai Surat Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022	12
Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Sesuai Permendagri 18 tahun 2020	14
Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025	19
Tabel 2. 8 Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja	20
Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025	26
Tabel 3. 2 Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sesuai Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022	27
Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendidikan Sesuai Permendagri 18 Tahun 2020	28
Tabel 3. 4 Pencapaian Kinerja Tujuan Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025	30
Tabel 3. 5 Pencapaian Target Sasaran	32
Tabel 3. 6 Predikat dan Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Utama	33
Tabel 3. 7 Sasaran I Angka Rata-rata lama Sekolah Analisis Pencapaian Sasaran I	34
Tabel 3. 8 Sasaran II Harapan Lama Sekolah Analisis Pencapaian Sasaran II	34
Tabel 3. 9 Rata-rata Lama Sekolah Analisis Pencapaian Sasaran II Perbandingan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	35
Tabel 3. 10 Sasaran II Harapan Lama Sekolah Analisis Pencapaian Sasaran II Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	36
Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran TA. 2025	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang diterjemahkan pada Rencana Strategis, Dinas Pendidikan melakukan evaluasi atas capaian realisasi kinerja maupun keuangan setiap akhir tahun anggaran. Melalui Laporan Kinerja Tahunan sebagai bentuk laporan akuntabilitas atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang menyelenggarakan tugas urusan wajib pelayanan dasar disusun sesuai dengan amanah yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati Serdang Bedagai dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan mencantumkan target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan sebagaimana telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja Dinas Pendidikan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 diharapkan dapat memberi informasi yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai lahir sejalan dengan pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2005. Dasar pembentukannya, berdasarkan Perda No. 3 tahun 2005 tentang organisasi dinas-dinas daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Perda Nomor 4 tahun 2007 tentang perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2005.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah telah bergeser dari sistem sentralisasi kepada sistem desentralisasi, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh pusat akan tetapi telah memberikan kewenangan kepada kabupaten untuk menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan di semua sektor, khususnya di bidang pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran. Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai antara lain:

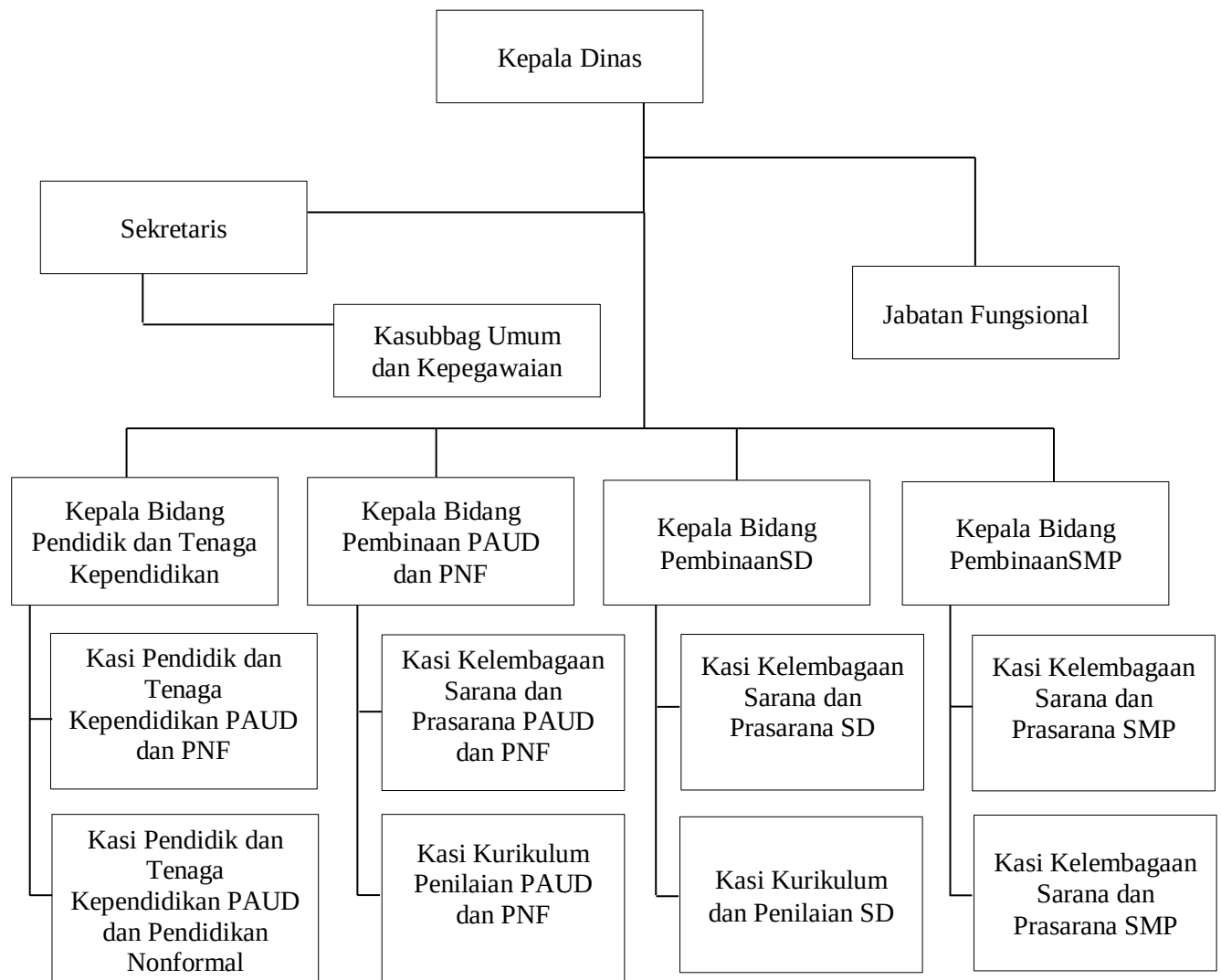
1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan
2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan dan pemberian perizinan lembaga pendidikan formal dan non formal sesuai ketentuan yang berlaku
3. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam perkembangan kebutuhan, karakteristik, kemampuan dan potensi daerah guna mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah maka dilaksanakan penataan kelembagaan dengan ditetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai No 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Sesuai peraturan dimaksud struktur kerja Dinas Pendidikan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, dibantu oleh
 - a. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
3. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
 - a. Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana Dan Prasarana
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - a. Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana Dan Prasarana
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - a. Kepala Seksi Kurikulum Dan Penilaian
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana Dan Prasarana
6. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - a. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

- b. Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal
- 7. Satuan Pendidikan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- 9. Kelompok Jabatan Pelaksana

Adapun bagian struktur organisasi Dinas Pendidikan sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Serdang Bedagai No 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut :



1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menjadi dasar terbentuknya Dinas Pendidikan. Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Daerah dimaksud bahwa Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pendidikan Tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 1 (satu) sub bagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.

Selanjutnya, dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menguraikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Pendidikan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan;
2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan dan pemberian perizinan lembaga; pendidikan formal dan non formal sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
4. Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Dasar Hukum

Sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- r. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

1.4 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Dinas Pendidikan selama Tahun 2025. Capaian Kinerja 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun Laporan Kinerja /manfaat Laporan Kinerja, Gambaran Umum Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan tentang tujuan dan sasaran perangkat daerah serta mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dijabarkan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tingkat pendidikan		Indeks Pendidikan	0,6367	0,6398	0,647	0,6518	0,6578	0,6638
		Memperluas akses pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,57	8,62	8,74	8,77	8,85	8,93
		Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,64	12,71	12,83	12,94	13,06	13,18
		Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	74,77	77	80
		Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pendidikan	88	89	90	91	92	93

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka aspek-aspek pembangunan disusun sesuai agenda dalam program pembangunan pada rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021-2026 yaitu:

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan

Visi : “Menjadikan Kabupaten Serdang Bedagai Yang Mandiri, Sejahtera dan Religius”			
Misi : 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tingkat Pendidikan	Memperluas akses pendidikan	1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan di jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal	1. Penyediaan Rincian Data masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar menengah 2. Penyediaan Lembaga Pendidikan PAUD dan Kesetaraan 3. Melakukan pendataan yang terinci mengenai data anak 5-6 tahun dan daya tampung kebutuhan
		2. Meningkatnya Siswa Miskin penerima Beasiswa	4. Mengoptimalkan pengadaan bantuan pendidikan bagi PAUD Kesetaraan 5. Tersedianya Layanan Pendidikan Inklusi

		3. Meningkatkan sarana prasarana yang memadai	1. Belum memaksimal keakuratan rincian Data siswa miskin 2. Belum adanya menganggarkan bantuan siswa miskin dari APBD 3. Mengoptimalkan pendataan kondisi sarpras
	Meningkatnya mutu pendidikan	1. Meningkatkan kualitas Peserta didik	1. Meningkatnya Karakter Peserta didik 2. Meningkatnya Nilai Literasi peserta didik 3. Meningkatnya Nilai Numerasi peserta didik.
		2. Meningkatkan Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Meningkatnya ratio pengawas dan penilik Pendidikan Dasar, Sekolah PAUD, Non Formal 2. Bertambahnya Kepsek yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas 3. Bertambahnya kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan 4. Meningkatnya kompetensi Pendidik pada Pendidikan Dasar, PAUD dan kesetaraan
		3. Meningkatkan kegiatan Ekstra Kurikuler	1. Meningkatnya peran pendidik untuk mendukung kegiatan Ekstra Kurikuler 2. Meningkatnya fasilitasi bagi siswa untuk berkreasi 3. Tersedianya tutor/pengajar untuk mendukung kegiatan Ekstra Kurikuler
		4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Mengoptimalkan pendataan kondisi sarpras 2. Perencanaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan dengan data yang riil melalui penilaian dan analisis kebutuhan 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai standar 4. Mencari berbagai sumber pendanaan untuk perolehan dan pemeliharaan serta rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan ada 3 program dan 11 kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025, berikut disajikan dalam Tabel 2.3 Rincian Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2025.

Tabel 2. 3 Rincian Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan bagi Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah untuk
- b. Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- c. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- d. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

- e. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- f. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.3.1 Indikator Kinerja Utama, Standar Pelayanan Publik (SPM) dan IKK

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pencapaian atas tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif.

Ada 5 (lima) indikator Kinerja Utama Untuk SPM (Standar Pelayanan Minimal) sebanyak 15 indikator, dan untuk IKK (Indikator Kinerja Kunci) sebanyak 33 indikator Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. Berikut disajikan dalam Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama dan formulasi pengukuran kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 2. 4 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	BIDANG PENDIDIKAN	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	2026
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
	INDIKATOR KINERJA UTAMA											
1	Indeks Pendidikan	tahun	0,6399	0,6399	0,6412	0,6412	0,6477	0.6461	0,6518	0,6554	0,6578	0,6638
2	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,57	8,69	8,62	8,71	8,74	8.85	8,90	9,12	8,95	9,00
3	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,64	12,61	12,71	12,63	12,83	12.64	12,94	12,65	13,06	13,18
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	predikat	BB	B	BB	B	BB	BB	74,77	74,77	77	80
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	poin	88	87	89	88,46	90	90.03	91	91,99	92	93

Tabel 2. 5 TARGET INDIKATOR SPM SESUAI SURAT PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 32 TAHUN 2022

No	BIDANG PENDIDIKAN	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	2026
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)											
1	Jumlah anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)	%	Na	75,53	na	75,45	100%	71,37	100%	76,89	79,93	82,97
2	Jumlah anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	%	Na	98,25	na	98,07	100%	98,36	100%	99,01	99,33	99,66
3	Jumlah anak Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (paket A/B/C) (APS)	%	75	13,51	76	21,02	100%	26,30	100%	34,58	39,55	44,53
4	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	Na	48,76	51,26	50,13	52,64	55,69	56,39	57,71	60,21	62,71

No	BIDANG PENDIDIKAN	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	2026
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
5	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	Na	35,49	38,79	38,00	39,52	46,09	46,66	52,58	55,48	58,38
6	Indeks Iklim Keamanan SD	%	Na	69,48	71,02	68,71	72,25	73,55	75,79	76,01	76,91	77,81
7	Indeks Iklim Kebinekaan SD	%	Na	59,89	62,39	67,91	70,4	73,13	75,76	71,32	72,32	73,32
8	Indeks Inklusivitas SD	%	Na	54,16	56,26	55,48	58,58	55,14	61,49	59,56	62,06	64,56
9	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	0,9	56,09	58,59	58,14	61,05	63,46	63,95	64,23	65,33	66,43
10	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	0,6	56,09	57,19	58,14	60,47	58,07	62,79	58,84	60,34	61,84
11	Indeks Iklim Keamanan SMP	%	Na	69,48	69,17	65,83	70,71	69,28	72,51	69,06	70,56	72,06
12	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	%	Na	59,89	62,1	65,36	67,57	72,54	74,46	70,30	71,30	72,30
13	Indeks Inklusivitas SMP	%	Na	54,16	57,16	55,5	58,6	56,05	61,7	55,83	58,23	60,63
14	Proporsi PAUD Terakreditasi minimal B	%	Na	18.24	Na	14.36	14,39	17,75	17,78	16,58	17,44	19,11
15	Pertumbuhan proporsi guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D4	%	Na	36.89	Na	33.96	35,06	48,6	50,74	48,65	39,73	40,73

Tabel 2. 6

INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PENDIDIKAN SESUAI PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
2.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	75,53%	75,45%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,01%	98,91%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96,88%	96,06%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.5	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	18,24%	18,27%	14,39%	14,42%	15%	15,50%	15,50%
2.1.1.6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	1801	1838	1874	1910	1945	1981	1981
2.1.1.7	Jumlah pendidik pada PAUD	1100	1135	1171	1207	1242	1277	1277

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1.1.8	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	36,89	38,52	35,06	37,16	38,96	40,76	40,76
2.1.1.9	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	44.67%	48,3 %	50%	52%	54%	56%	56%
2.1.1.10	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD : 462 SMP : 92	SD : 447 SMP : 96	SD : 447 SMP : 96	SD : 447 SMP : 96	SD : 447 SMP : 96	SD : 447 SMP : 96	SD : 447 SMP : 96
2.1.1.11	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.12	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah							
2.1.1.13	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	86%	86%	88%	89%	90%	90%	90%
2.1.1.14	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	70%	70%	72%	74%	76%	76%	76%
2.1.1.15	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	5800	5910	5946	5982	6017	6053	6053
2.1.1.16	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2100	2152	2188	2224	2259	2295	2295
2.1.1.17	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4079	3920	3887	3959	3994	4030	4030
2.1.1.18	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1367	1365	1323	1353	1383	1413	1413
2.1.1.19	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1100	1105	1141	1173	1212	1248	1248
2.1.1.20	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah	475	489	525	561	596	632	632

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pertama							
2.1.1.21	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	578	635	636	640	644	650	650
2.1.1.22	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	293	292	302	310	315	320	320
2.1.1.23	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1333	1167	1132	1350	1370	1400	1400
2.1.1.24	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	684	622	603	615	625	630	630
2.1.1.25	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	451	451	447	447	447	447	447
2.1.1.26	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda	70	72	75	78	85	85	85

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah							
2.1.1.27	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	12	13	13	15	16	16	16
2.1.1.28	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	20	25	29	35	40	45	45
2.1.1.29	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	140	145	181	217	252	288	288
2.1.1.30	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	50	50	60	65	70	70	70
2.1.1.31	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	9	9	12	14	17	17	17
*2.1.1.3 2	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.33	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8	8	9	10	11	11	11

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Strategi	Indikator	Kebijakan	Indikator
Memperluas Akses Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Meningkatnya Akses Pendidikan	1. APS SD/ Sederajat 2. APS SMP/ Sederajat 3. APS PAUD 4. APS Kesetaraan	1. Meningkatnya daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan sekolah	1. rasio daya tampung sekolah SD terhadap kebutuhan 2. rasio daya tampung sekolah SMP terhadap kebutuhan 3. rasio daya tampung sekolah PAUD terhadap kebutuhan 4. rasio daya tampung Non Formal terhadap kebutuhan
				2. Menurunnya Penduduk Putus Sekolah	1. Angka Putus Sekolah SD/MI 2. Angka Putus Sekolah SMP/MTs
				3. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan	1. %sekolah dengan sarana dan Prasarana sesuai standar nasional
				4. Meningkatnya partisipasi penduduk putus sekolah pada pendidikan non formal (Kejar Paket A dan B)	1. % penduduk putus sekolah yang mengikuti kejar paket A dan B
				5. Meningkatnya akses pendidikan bagi penduduk miskin	1. % peserta didik dari keluarga berkategori kurang mampu/miskin
Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Nilai Asesmen Nasional Pendidikan 2. Hasil Sulingjar	1. Meningkatnya kualitas kompetensi dan karakter peserta didik	1. Nilai asesmen literasi 2. Nilai asesmen numerik 3. Nilai survey
				2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan guru dan tenaga kependidikan	1. %guru atau tenaga kependidikan bersertifikasi 2. % guru atau tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimal D IV/ S1 3. rasio guru-murid
				3. Meningkatnya literasi dan numerasi peserta didik	1. % peserta didik mencapai nilai minimum asesmen literasi 2. % peserta didik mencapai nilai minimum Asesmen numerik
				4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pendidikan	1. Capaian Iklim Kebinekaan 2. Capaian Iklim Keamanan 3. Capaian Iklim Inklusivitas

				5. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Karakter	1. % peserta didik dg nilai survei karakter berkategori baik
				6. Meningkatnya pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan	1. % sekolah dg jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan
				7. Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	1.% guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pelatihan dan pendidikan sesuai standar kompetensi 2. Jumlah guru dan tenaga kependidikan dg kualifikasi min. S1/DIV yang direkrut

Tabel 2. 8

Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula / Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data																										
1	Indeks Pendidikan		Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan harapan la6ma sekolah (expected years of schooling). Pada proses pementukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM-	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Keterangan: I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah I_{RLS} = Indeks Rata – rata Lama Sekolah $I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan <table><tr><th rowspan="2">Indikator Komponen IPM [=X(i)]</th><th colspan="2">Nilai</th><th rowspan="2">Catatan</th></tr><tr><th>Maks</th><th>Min</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th></tr><tr><td>Angka Harapan Hidup</td><td>85</td><td>20</td><td>Sesuai standar global (UNDP)</td></tr><tr><td>Angka Harapan Lama Sekolah</td><td>18</td><td>0</td><td>Sesuai standar global (UNDP)</td></tr><tr><td>Rata-rata lama sekolah</td><td>15</td><td>0</td><td>Sesuai standar global (UNDP)</td></tr><tr><td>Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli</td><td>26.572.352</td><td>1.007.436</td><td>UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan</td></tr></table>	Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai		Catatan	Maks	Min	(1)	(2)	(3)	(4)	Angka Harapan Hidup	85	20	Sesuai standar global (UNDP)	Angka Harapan Lama Sekolah	18	0	Sesuai standar global (UNDP)	Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli	26.572.352	1.007.436	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan	Dinas Pendidikan BPS
Indikator Komponen IPM [=X(i)]	Nilai		Catatan																												
	Maks	Min																													
(1)	(2)	(3)	(4)																												
Angka Harapan Hidup	85	20	Sesuai standar global (UNDP)																												
Angka Harapan Lama Sekolah	18	0	Sesuai standar global (UNDP)																												
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)																												
Konsumsi Perkapita yang disesuaikan (pendekatan terhadap daya beli	26.572.352	1.007.436	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan																												

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula / Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
		Harapan Lama Sekolah	- Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. - HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. - HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.	Formula HLS $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada usia a di tahun t E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t i Usia ($a, a + 1, \dots, n$) FK Faktor koreksi Pesantren dan Non Pesantren $FK = \frac{\text{Jumlah santri/siswa sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$	Dinas Pendidikan BPS
		Rata Lama Sekolah	- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. - Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. - RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. - Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	Dinas Pendidikan BP*S

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula / Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	APS PAUD 5-6 Tahun	Untuk mengetahui tingkat partisipasi penduduk terhadap suatu jenjang pendidikan dan kapasitas atau daya tampung sekolah dari kelompok usia tertentu	$\frac{\text{Jumlah Anak Didik usia 5-6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 5-6 tahun}}$	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
		APS Pendidikan Dasar 7-15 Tahun	Untuk mengetahui tingkat partisipasi penduduk terhadap suatu jenjang pendidikan dan kapasitas atau daya tampung sekolah dari kelompok usia tertentu	$\frac{\text{Jumlah Anak Didik usia 7-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-15 tahun}}$	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
		Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Mengetahui tingkat keberhasilan program prutisipasi sekolah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun yang bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-18 Tahun}}$	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
2	Harapan Lama Sekolah	Nilai Asesmen Kompetensi Literasi SD	Mengetahui batas kemampuan siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Sumber Data Kemendikbud Ristekdikti	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
		Nilai Asesmen Kompetensi Numerasi SD	Mengetahui batas kemampuan siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Sumber Data Kemendikbud Ristekdikti	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
		Iklim Inklusivitas SD	Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya	Sumber Data Kemendikbud Ristekdikti	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
		Iklim Kebhinekaan SD	Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.	Sumber Data Kemendikbud Ristekdikti	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
		Iklim Keamanan SD	Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan	Sumber Data Kemendikbud Ristekdikti	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formula / Rumus Perhitungan Capaian IKU	Sumber Data
		Nilai Asesmen Kompetensi Literasi SMP	Mengetahui batas kemampuan siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Sumber Data Kemendikbud Ristekdikti	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
		Nilai Asesmen Kompetensi Numerasi SMP	Mengetahui batas kemampuan siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Sumber Data Kemendikbud Ristekdikti	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
		Iklim Inklusivitas SMP	Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya	Sumber Data Kemendikbud Ristekdikti	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
		Iklim Kebhinekaan SMP	Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.	Sumber Data Kemendikbud Ristekdikti	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
		Iklim Keamanan SMP	Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan	Sumber Data Kemendikbud Ristekdikti	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
		Persentase Pendidik yang bersertifikat	Mengetahui rasio ketersediaan guru yang memenuhi kelayakan kualifikasi	$\frac{\text{Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang berijazah S1/D4}}{\text{Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan}}$	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
		Proporsi PAUD Terakreditasi minimal B	Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga pendidikan serta memberi panduan yang berkelanjutan	Jumlah PAUD yang terakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti
		Pertumbuhan proporsi guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D4	Mengetahui peningkatan porsi ketersediaan guru yang memenuhi kelayakan kualifikasi	$\frac{\text{Jumlah guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4}}{\text{Jumlah guru PAUD yang ada}}$	Dinas Pendidikan Kemendikbud Ristekdikti

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 dilakukan dengan mengukur pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Metode analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai / Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

No	Kategori	Rata-rata	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Hijau
2	Baik	75,00 – 89,99	Biru
3	Cukup	65,00 – 74,99	Kuning
4	Kurang	50,00 – 64,99	Abu-abu
5	Sangat Kurang	0 – 49,99	Merah

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Analisis tingkat efektivitas dan efisiensi capaian kinerja.

3.2 Capaian Kinerja

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah.

Tabel 3. 1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025

No	BIDANG PENDIDIKAN	TA. 2025		
		Target	Capaian	Persentase Capaian
	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	Indeks Pendidikan	0,6578	0,6560	99,64%
2	Rata-rata Lama Sekolah	8,95	9,13	102,01%
3	Harapan Lama Sekolah	13,06	12,66	96,94%
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	73,36	95,27%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	92	92,61	100,66%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Indikator kinerja yang melebihi target dengan capaian kinerja di atas 100% antara lain:
 - a. Rata-rata Lama Sekolah
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan
2. Indikator kinerja yang tidak mencapai target dengan capaian kinerja di bawah 100% antara lain:
 - a. Indeks Pendidikan
 - b. Angka Harapan Lama Sekolah
 - c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 3. 2
TARGET INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
SESUAI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 32 TAHUN 2022

No	BIDANG PENDIDIKAN	Satuan	SPM 2025		
			Target	Capaian	Persentase
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)				
1	Jumlah anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)	%	79,93	70,44	88,13
2	Jumlah anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	%	99,33	98,58	99,24
3	Jumlah anak Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (paket A/B/C) (APS)	%	39,55	23,67	59,85
4	Skor kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	60,21	52,77	87,64
5	Skor kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	55,48	47,24	85,15
6	Iklim Keamanan SD	%	76,91	73,34	95,36
7	Iklim Kebinekaan SD	%	72,32	65,36	90,38
8	Iklim Inklusivitas SD	%	62,06	57,71	92,99
9	Skor kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	65,33	65,64	100,47
10	Skor kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	60,34	58,97	97,73
11	Iklim Keamanan SMP	%	70,56	69,24	98,13
12	Iklim Kebinekaan SMP	%	71,3	66,7	93,55
13	Iklim Inklusivitas SMP	%	58,23	57,83	99,31
14	Proporsi PAUD Terakreditasi minimal B	%	17,44	21,03	120,58
15	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	%	39,73	45,43	114,35

Sumber Data : Rapor Pendidikan 2026

Tabel 3. 3
INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PENDIDIKAN
SESUAI PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2025		
		Target	Capaian	Persentase
(1)	(2)	(7)	(8)	
2	ASPEK PELAYANAN UMUM			
2.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
2.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	89	76,89	86,39
2.1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93	99,91%	-0,92
2.1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	87	96,89%	-0,86
2.1.1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	76	34,58	0,41
2.1.1.5	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	15	44%	0,15
2.1.1.6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	408	408	1,00
2.1.1.7	Jumlah pendidik pada PAUD	861	861	1,00
2.1.1.8	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	121	48	-0,73
2.1.1.9	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	58	47%	-0,58
2.1.1.10	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	433	433	1,00
2.1.1.11	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	100%	100%	1,00
2.1.1.12	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	100%	100%	1,00
2.1.1.13	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	85,01%	85,01%	1,00
2.1.1.14	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	71	70,28%	-0,70
2.1.1.15	Jumlah kebutuhan minimal pendidik	4.238	4328	0,90

	pada jenjang sekolah dasar			
2.1.1.16	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.477	1.478	1,01
2.1.1.17	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.922	3.965	0,43
2.1.1.18	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.404	1.404	1,00
2.1.1.19	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.350	1.350	1,00
2.1.1.20	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	475	475	1,00
2.1.1.21	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	258	246	-0,12
2.1.1.22	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	245	230	-0,15
2.1.1.23	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.510	1.727	7,83
2.1.1.24	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.034	849	1,85
2.1.1.25	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		380	
2.1.1.26	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda		78	
	tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
2.1.1.27	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	19	1	0,18
2.1.1.28	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	100	6,058	0,06
2.1.1.29	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	246	246	1,00
2.1.1.30	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	179	179	1,00
2.1.1.31	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	17	95	0,78
2.1.1.32	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100%	84,44%	0,00
2.1.1.33	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	11	13	1,02

Tabel 3. 4
Pencapaian Kinerja Tujuan Sasaran
Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagau Tahun 2025

No	BIDANG PENDIDIKAN	TA. 2025			Kode Warna
		Persentase Capaian	Persen	Keterangan	
	INDIKATOR KINERJA UTAMA				
1	Indeks Pendidikan	99,64%	< 100%	Tidak tercapai	
2	Rata-rata Lama Sekolah	102,01%	>100%	Melebihi target	
3	Harapan Lama Sekolah	96,94%	< 100%	Tidak tercapai	
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	95,27%	< 100%	Tidak tercapai	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	100,66	>100%	Melebihi target	

No.	BIDANG PENDIDIKAN	TA. 2025			Kode Warna
		Persentase Capaian	Persen	Keterangan	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (SPM PENDIDIKAN)				
1	Jumlah anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)	88,13	< 100%	Tidak tercapai	
2	Jumlah anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	99,24	< 100%	Tidak tercapai	
3	Jumlah anak Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (paket A/B/C) (APS)	59,85	< 100%	Tidak tercapai	
4	Skor kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	87,64	< 100%	Tidak tercapai	
5	Skor kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	85,15	< 100%	Tidak tercapai	
6	Iklim Keamanan SD	95,36	< 100%	Tidak tercapai	
7	Iklim Kebinekaan SD	90,38	< 100%	Tidak tercapai	
8	Iklim Inklusivitas SD	92,99	< 100%	Tidak tercapai	
9	Skor kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	100,47	> 100%	Tercapai	
10	Skor kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	97,73	< 100%	Tidak tercapai	
11	Iklim Keamanan SMP	98,13	< 100%	Tidak tercapai	
12	Iklim Kebinekaan SMP	93,55	< 100%	Tidak tercapai	
13	Iklim Inklusivitas SMP	99,31	< 100%	Tidak tercapai	
14	Proporsi PAUD Terakreditasi minimal B	120,58	> 100%	Tercapai	
15	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	114,35	> 100%	Tercapai	

Catt. Data capaian menggunakan Rapor Pendidikan 2026

3.2.2 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua). Tahun 2025 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja termasuk indikator kinerja tujuan yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagaimana yang telah disebutkan pada Tabel 3.1. di atas.

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Pencapaian Target Sasaran

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Tingkat Pencapaian					
		Melebihi target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Tidak mencapai target (<100%)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	3	0	0	0	0	3	100%
2. Harapan Lama Sekolah	12	3	25%	0	0	9	75%

Dari 2 sasaran terdapat 3 indikator melebihi target dan 12 indikator tidak mencapai target.

*

Tabel 3. 6 Predikat dan Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (Tuiuan dan Sasaran)	Persentase Capaian	Predikat	Kategori
1	Indeks Pendidikan	99,64%	Tidak tercapai	Sangat baik
2	Rata-rata Lama Sekolah	102,01%	Melebihi target	Sangat baik
3	Harapan Lama Sekolah	96,94%	Tidak tercapai	Sangat baik
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	97,10%	Tidak tercapai	Sangat baik
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	101,08%	Melebihi target	Sangat baik
	Indikator Kinerja Kunci			
1	Jumlah anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)	88,13	Tidak tercapai	Baik
2	Jumlah anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	99,24	Tidak tercapai	Sangat baik
3	Jumlah anak Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesenjangan (paket A/B/C) (APS)	59,85	Tidak tercapai	Kurang
4	Skor kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	87,64	Tidak tercapai	Baik
5	Skor kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	85,15	Tidak tercapai	Baik
6	Iklim Keamanan SD	95,36	Tidak tercapai	Sangat baik
7	Iklim Kebinekaan SD	90,38	Tidak tercapai	Sangat baik
8	Iklim Inklusivitas SD	92,99	Tidak tercapai	Sangat baik
9	Skor kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	100,47	Melebihi target	Sangat baik
10	Skor kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	97,73	Tidak tercapai	Sangat baik
11	Iklim Keamanan SMP	98,13	Tidak tercapai	Sangat baik
12	Iklim Kebinekaan SMP	93,55	Tidak tercapai	Sangat baik
13	Iklim Inklusivitas SMP	99,31	Tidak tercapai	Sangat baik
14	Proporsi PAUD Terakreditasi minimal B	120,58	Melebihi target	Sangat baik
15	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	114,35	Melebihi target	Sangat baik

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis dengan perbandingan antara lain:

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
- kinerja nyata dengan target akhir renstra.

Dengan menggunakan analisis tersebut, maka diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis.

Tabel 3. 7

Sasaran I

Angka Rata-rata Lama Sekolah Analisis Pencapaian Sasaran I

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran I				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	Rata-rata Lama Sekolah	8,95	9,13	102,1%
1	Jumlah anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)	79,93	70,44	88,13%
2	Jumlah anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	99,33	98,58	99,24%
3	Jumlah anak Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (paket A/B/C) (APS)	39,55	23,67	59,85%

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tujuan/sasaran I, terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai 100% walaupun masih berkinerja baik. Hal ini menunjukkan kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 dalam mencapai sasaran I tinggi, namun data yang digunakan adalah data Rapor Pendidikan 2025 hasil dari kinerja 2024. Selanjutnya menunggu dikeluarkannya Rapor Pendidikan 2026 maka hasil analisis akan berbeda bila hasil 2025 sudah dirilis.

Tabel 3. 8

Sasaran II

Harapan Lama Sekolah Analisis Pencapaian Sasaran II

Sasaran II				
No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja
1	Skor kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	60,21	52,77	87,64
2	Skor kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	55,48	47,24	85,15
3	Iklim Keamanan SD	76,91	73,34	95,36
4	Iklim Kebinekaan SD	72,32	65,36	90,38

5	Iklm Inklusivitas SD	62,06	57,71	92,99
6	Skor kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	65,33	65,64	100,47
7	Skor kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	60,34	58,97	97,73
8	Iklm Keamanan SMP	70,56	69,24	98,13
9	Iklm Kebinekaan SMP	71,3	66,7	93,55
10	Iklm Inklusivitas SMP	58,23	57,83	99,31
11	Proporsi PAUD Terakreditasi minimal B	17,44	21,03	120,58
12	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	39,73	45,43	114,35

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja tujuan/sasaran II, terdapat 3 sasaran yang capaiannya melebihi target dan 9 sasaran indikator yang tidak tidak mencapai 100%. Hal tersebut mempengaruhi capaian Harapan Lama Sekolah yang capaiannya belum maksimal.

3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3. 9
Rata- Rata Lama Sekolah Analisis Pencapaian Sasaran II
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Perbandingan Realisasi 2025 dengan 2024	Perbandingan Realisasi 2025 dengan 2023
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,71	8,85	9,12	9,13	Meningkat	Meningkat
1	Jumlah anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)	75,45%	71,37%	76,89%	70,44%	Menurun	Menurun
2	Jumlah anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	98,07%	98,36%	99,01%	98,58%	Menurun	Meningkat
3	Jumlah anak Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (paket A/B/C) (APS)	21,02	26,30%	34,58%	23,67%	Menurun	Menurun

Tabel 3. 10
Sasaran II Harapan Lama Sekolah Analisis Pencapaian Sasaran II
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Perbandingan Realisasi 2025 dengan 2024	Perbandingan Realisasi 2025 dengan 2023
	Harapan Lama Sekolah	12,63	12,64	12,65	12,66	Meningkat	Meningkat
1	Skor kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	50,13	55,69	57,71	52,77	Menurun	Meningkat
2	Skor kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	38,00	46,09	52,58	47,24	Menurun	Meningkat
3	Iklim Keamanan SD	68,71	73,55	76,01	73,34	Menurun	Menurun
4	Iklim Kebinekaan SD	67,91	73,13	71,32	65,36	Menurun	Menurun
5	Iklim Inklusivitas SD	55,48	55,14	59,56	57,71	Menurun	Meningkat
6	Skor kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	58,14	63,46	64,23	65,64	Meningkat	Meningkat
7	Skor kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	58,14	58,07	58,84	58,97	Meningkat	Meningkat
8	Iklim Keamanan SMP	65,83	69,28	69,06	69,24	Meningkat	Menurun
9	Iklim Kebinekaan SMP	65,36	72,54	70,30	66,7	Menurun	Menurun
10	Iklim Inklusivitas SMP	55,5	56,05	55,83	57,83	Meningkat	Meningkat
11	Proporsi PAUD Terakreditasi minimal B	14,36	17,75	16,58	21,03	Meningkat	Meningkat
12	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	33,96	48,64	48,65	45,43	Menurun	Menurun

Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun 2024 maka capaian kinerja untuk sasaran II, 7 (tujuh) indikator tujuan/sasaran mengalami penurunan yaitu :

- Skor kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional Iklim Keamanan SMP
- Skor kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional
- Iklim Keamanan SD
- Iklim Kebinekaan SD
- Iklim Inklusivitas SD
- Iklim Kebinekaan SMP
- Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4

Namun untuk 6 indikator lainnya mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 dengan 2025. Hal ini tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai kebijakan baik itu kebijakan daerah maupun kebijakan di tingkat pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 2026

Indikator	Realisasi Kinerja 2025	Target Akhir P-RENSTRA 2026	Persentase Capaian	Keterangan
Indeks Pendidikan	0,6560	0,6638	98,83%	
Rata-rata Lama Sekolah	9,13	9,00	101,45%	
Harapan Lama Sekolah	12,66	13,18	96,06%	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,36	74,77	98,12%	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	92,61	93	99,58%	

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja 2025 dengan Target P-Renstra Tahun 2025

Indikator	Realisasi Kinerja 2025	Target P-Renstra 2025	Persentase Capaian	Keterangan
Indeks Pendidikan	0,6554	0,6578	99,64%	
Rata-rata Lama Sekolah	9,13	8,95	102,02%	
Harapan Lama Sekolah	12,66	13,06	96,94%	
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,36	74,77	98,12%	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	92,61	92	100,67%	

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja sasaran I sebagai berikut:

- Jika dibandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target P-RPJMD 2025, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang belum tercapai yaitu :
 - Jumlah anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (APS)
 - Jumlah anak Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)
 - Iklim Inklusivitas SD
 - Skor kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
- Rendahnya angka partisipasi sekolah untuk anak usia 5–6 tahun di tingkat kabupaten

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- 1. Faktor Ekonomi
 - Keterbatasan biaya untuk menyekolahkan anak ke TK atau PAUD.
 - Biaya tambahan seperti seragam, transportasi, dan perlengkapan sekolah yang dianggap membebani.
 - 2. Faktor Kesadaran dan Sosial Budaya
 - Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini.
 - Adanya anggapan bahwa pendidikan formal baru diperlukan saat usia SD.
 - Budaya yang lebih menekankan pembelajaran di rumah atau lingkungan sekitar.
 - 3. Ketersediaan dan Aksesibilitas Sekolah
 - Jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal anak.
 - Terbatasnya jumlah TK atau PAUD, terutama di daerah pedesaan atau terpencil.
 - Fasilitas sekolah yang kurang memadai.
 - 4. Faktor Kualitas Pendidikan
 - Kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan bersertifikasi di PAUD/TK.
 - Kurangnya fasilitas pendukung seperti alat permainan edukatif, ruang kelas yang nyaman, dan kurikulum yang menarik.
 - Metode pembelajaran yang kurang menarik bagi anak usia dini.
 - 5. Kebijakan dan Regulasi
 - Belum adanya kebijakan wajib belajar untuk anak usia 5–6 tahun.
 - Kurangnya program subsidi atau bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
- Rendahnya capaian **angka harapan lama sekolah (HLS)** di tingkat kabupaten dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:
- Faktor Ekonomi
 - Kemiskinan: Banyak anak yang putus sekolah karena harus bekerja membantu ekonomi keluarga.
 - Biaya Pendidikan: Meskipun sekolah dasar hingga menengah sudah gratis, biaya tambahan seperti seragam, transportasi, dan buku tetap menjadi kendala.
 - Aksesibilitas dan Infrastruktur
 - Jarak Sekolah yang Jauh: Di daerah pedesaan atau terpencil, sekolah menengah atau tinggi mungkin sulit dijangkau.
 - Fasilitas Pendidikan Terbatas: Kurangnya jumlah sekolah menengah atas dan perguruan tinggi menghambat anak untuk melanjutkan pendidikan.
 - Kualitas Transportasi: keterbatasan transportasi umum membuat anak kesulitan bersekolah.
 - Faktor Sosial dan Budaya
 - Persepsi tentang Pendidikan: Beberapa masyarakat masih menganggap pendidikan

tinggi tidak terlalu penting, terutama bagi anak perempuan.

- Pernikahan Dini: Anak yang menikah muda cenderung putus sekolah lebih awal.
- Kualitas Pendidikan
- Minimnya Motivasi untuk Melanjutkan Sekolah: Kurangnya tenaga pendidik berkualitas dan lingkungan belajar yang kurang kondusif membuat anak kehilangan minat untuk bersekolah lebih lama.
- Kurangnya Fasilitas Penunjang: Perpustakaan, laboratorium, dan akses internet yang terbatas dapat menghambat proses pembelajaran.
- Kebijakan dan Regulasi
- Kurangnya Program Wajib Belajar hingga Tingkat Lanjut: Jika kebijakan hanya mendorong pendidikan hingga tingkat dasar atau menengah, angka HLS bisa tetap rendah.
- Minimnya Beasiswa atau Bantuan Pendidikan: Anak dari keluarga miskin mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak ada dukungan finansial.

3.5 Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran

Untuk pencapaian sasaran I dicapai melalui 1 Program Kegiatan yaitu :

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Program :

Persentase APSPAUD 5-6 Tahun

Proporsi PAUD Terakreditasi minimal B

Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Output		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,346,704,400	1,350,176,415	100%	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2	Unit
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	211,553,900	176,986,580	83.66%	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	370	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5,582,100,000	5,355,380,224	95.94%	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	347	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	71,260,000	66,304,517	93.05%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15	Dokumen
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	63,774,000	33,082,490	51.87%	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16,100,000	-	-	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	Komunitas Belajar
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200,000,000	199,078,834	99.54%	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	Ruang
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	300,000,000	295,141,200	98.38%	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2700	Peserta Didik
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	189,704,000	147,747,030	77.88%	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900	Orang
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	150,000,000	138,969,588	92.65%	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	600	Paket

1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	449,970,000	449,758,480	99.95%	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	12	Paket
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	50,000,000	49,531,863	99.06%	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Indikator Program : APS 7-12 tahun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Output		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,886,867,481	2,042,359,767	70.75%	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13	Unit
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	137,384,320	137,379,150	100.00%	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2	Paket
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1,753,920,000	1,612,800,000	91.95%	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1280	Paket
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	664,880,300	611,539,872	91.98%	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500	Peserta Didik
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3,240,000,000	3,020,100,000	93.21%	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	900	Orang
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	214,385,000	207,860,000	96.96%	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	220	Orang
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	338,146,000	327,207,315	96.77%	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	448	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	58,453,500,000	58,446,474,231	99.99%	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	448	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	68,052,500	53,218,565	78.20%	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200	Orang
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	263,455,000	249,874,569	94.85%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200	Orang
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	88,977,000	77,950,756	87.61%	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3	Konten Digital
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	98,364,000	87,165,665	88.62%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	Dokumen
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	160,426,000	145,374,595	90.62%	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4	Dokumen
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	137,499,000	131,539,250	95.67%	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5	Paket
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2,209,596,000	1,155,571,050	52.30%	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13,722	Paket
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,108,523,680	3,061,742,392	98.50%	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	Unit
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	651,398,000	578,211,806	88.76%	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1600	Orang
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	40,924,977,000	39,499,392,120	96.52%	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	197	Ruang
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2,471,762,000	2,425,507,247	98.13%	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16	Paket

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Program: APS 13-15 tahun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Output		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,100,000,000	1,091,773,800	99.25%	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	Ruang
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,600,000,000	1,582,554,750	98.91%	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5	Ruang
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	1,600,000,000	1,587,019,170	99.19%	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5	Ruang
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	457,075,000	454,659,616	99.47%	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3	Unit
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	17,668,996,416	16,458,146,000	93.15%	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	64	Ruang
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	150,000,000	149,196,735	99.46%	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,152,002,000	3,130,944,333	99.33%	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	Unit
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	532,651,605	503,553,978	94.54%	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	9	Paket
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	250,000,000	250,000,000	100%	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500	Peserta Didik
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	936,922,500	840,482,575	89.71%	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500	Peserta Didik
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	368,760,000	360,000,000	97.62%	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	288	Orang
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	53,700,000	50,100,000	93.30%	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	96	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	27,063,550,000	27,062,321,450	99.99%	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	96	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	57,265,000	37,860,600	66.11%	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	170	Orang
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	57,740,000	52,459,810	90.86%	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150	Orang
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	165,000,000	164,500,000	99.70%	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	175	Orang
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	58,160,000	56,540,034	97.21%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30	Dokumen
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	200,000,000	199,000,000	99.50%	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	710,149,600	703,166,130	99.02%	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	Ruang
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	715,464,183	657,971,903	91.96%	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	600	Orang

1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	207,800,000	201,551,250	96.99%	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000	Buku
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1,301,807,861	973,508,850	74.78%	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7204	Paket
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,000,000,000	993,247,488	99.32%	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	Ruang
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4,272,200,000	4,196,014,080	98.22%	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20	Paket

3. Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan, Indikator Program Persentase partisipasi masyarakat 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Output		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	318,000,000	139,600,000	43.90	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	575	Orang
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5,710,100,000	5,669,044,500	99.81	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16	Satuan Pendidikan
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	195,916,600	129,215,165	65.95	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4	Dokumen
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	51,000,000	49,950,000	97.94	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	300	Paket
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	93,998,000	53,892,025	57.33	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100	Orang

3.6 Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Atas Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase	Kcuangan			
					Program	Pagu	Rcalisasi	Perscntase
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,95	9,13	102,01%	Program Pengelolaan Pendidikan	196,551,538,346	190,054,621,313	96,69%
2	APS PAUD 5-6 Tahun	79,93%	70,44%	88,13%				
3	APS Pendidikan Dasar 7-15 Tahun	99,33%	98,58%	99,24%				
4	Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	39,55%	23,67%	59,85%				
RATA RATA CAPAIAN INDIKATOR				87,31%	TOTAL SASARAN			
TINGKAT EFISIENSI								
TINGKAT EFEKTIFITAS								

3.7 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran pada tahun 2023 diperlihatkan pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran TA. 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	poin	77	poin	486,443,667,494	473,099,753,197
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	5	Dokumen	21,546,400	12,965,000
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	9,426,400	7,075,000
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2	Laporan	12,120,000	5,890,000
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	poin	77	poin	483,693,934,469	470,508,567,309
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3500	Orang/Bulan	3500	Orang/Bulan	483,693,934,469	470,508,567,309
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	poin	77	poin	291,689,000	263,881,555
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	9,637,500	8,256,435
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Peralatan dan	4	Paket	4	Paket	102,648,500	92,683,951

	Kantor	Perlengkapan Kantor						
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	9,922,000	9,585,220
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket	10	Paket	20,000,000	16,780,000
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	26,800,000	25,085,723
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	12	Dokumen	21,952,000	19,380,000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan	8	Laporan	100,729,000	92,110,226
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	poin	77	poin	125,800,000	124,086,798
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	15	Unit	99,800,000	99,336,996

1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	Unit	7	Unit	26,000,000	24,749,802
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	poin	77	poin	1,558,957,625	1,484,815,947
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	103,090,000	100,042,470
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13	Laporan	13	Laporan	289,512,925	223,538,477
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	59,654,700	54,535,000
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	1,106,700,000	1,106,700,000
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	poin	77	poin	751,740,000	705,436,588

1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	144,000,000	128,000,000
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	6	Unit	607,740,000	577,436,588
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi pada PAUD (APS)	79,93	%	79,93	%	196,551,538,346	190,054,621,313
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah anak umur 7-12 tahun mengikuti Pendidikan SD (APS)	99,91	%	99,91	%	117,872,113,281	113,871,268,350
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13	Unit	13	Unit	2,886,867,481	2,042,359,767
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2	Paket	2	Paket	137,384,320	137,379,150
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1280	Paket	1280	Paket	1,753,920,000	1,612,800,000
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	500	Peserta Didik	500	Peserta Didik	664,880,300	611,539,872

		Akademik dan Non Akademik						
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	900	Orang	900	Orang	3,240,000,000	3,020,100,000
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	220	Orang	220	Orang	214,385,000	207,860,000
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	448	Satuan Pendidikan	448	Satuan Pendidikan	338,146,000	327,207,315
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	448	Satuan Pendidikan	448	Satuan Pendidikan	58,453,500,000	58,446,474,231
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	200	Orang	200	Orang	68,052,500	53,218,565

1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200	Orang	200	Orang	263,455,000	249,874,569
1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3	Konten Digital	3	Konten Digital	88,977,000	77,950,756
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	Dokumen	4	Dokumen	98,364,000	87,165,665
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4	Dokumen	4	Dokumen	160,426,000	145,374,595
1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	5	Paket	5	Paket	137,499,000	131,539,250
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13,722	Paket	13,722	Paket	2,209,596,000	1,155,571,050
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	Unit	10	Unit	3,108,523,680	3,061,742,392

1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1600	Orang	1600	Orang	651,398,000	578,211,806
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	197	Ruang	197	Ruang	40,924,977,000	39,499,392,120
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	16	Paket	16	Paket	2,471,762,000	2,425,507,247
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang mengikuti Pendidikan SMP (APS)	96,91	%	96,91	%	63,679,244,165	61,756,572,552
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	Ruang	2	Ruang	1,100,000,000	1,091,773,800
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5	Ruang	5	Ruang	1,600,000,000	1,582,554,750
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5	Ruang	5	Ruang	1,600,000,000	1,587,019,170
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang	3	Unit	3	Unit	457,075,000	454,659,616

		Telah Dibangun						
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	64	Ruang	64	Ruang	17,668,996,416	16,458,146,000
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Ruang	1	Ruang	150,000,000	149,196,735
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	Unit	9	Unit	3,152,002,000	3,130,944,333
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	9	Paket	9	Paket	532,651,605	503,553,978
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500	Peserta Didik	500	Peserta Didik	250,000,000	250,000,000
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500	Peserta Didik	500	Peserta Didik	936,922,500	840,482,575

1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	288	Orang	288	Orang	368,760,000	360,000,000
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	96	Satuan Pendidikan	96	Satuan Pendidikan	53,700,000	50,100,000
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	96	Satuan Pendidikan	96	Satuan Pendidikan	27,063,550,000	27,062,321,450
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	170	Orang	170	Orang	57,265,000	37,860,600
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150	Orang	150	Orang	57,740,000	52,459,810

1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	175	Orang	175	Orang	165,000,000	164,500,000
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30	Dokumen	30	Dokumen	58,160,000	56,540,034
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	Dokumen	1	Dokumen	200,000,000	199,000,000
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1	Ruang	1	Ruang	710,149,600	703,166,130
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	600	Orang	600	Orang	715,464,183	657,971,903
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000	Buku	1000	Buku	207,800,000	201,551,250
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7204	Paket	7204	Paket	1,301,807,861	973,508,850

1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	Ruang	6	Ruang	1,000,000,000	993,247,488
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20	Paket	20	Paket	4,272,200,000	4,196,014,080
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS)	79,93	%	79,93	%	8,631,166,300	8,355,078,721
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2	Unit	2	Unit	1,346,704,400	1,350,176,415
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	370	Satuan Pendidikan	370	Satuan Pendidikan	211,553,900	176,986,580
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	347	Satuan Pendidikan	347	Satuan Pendidikan	5,582,100,000	5,488,301,724
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15	Dokumen	15	Dokumen	71,260,000	66,304,517
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	1	Dokumen	1	Dokumen	63,774,000	33,082,490

		dilaksanakan						
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1	Komunitas Belajar	1	Komunitas Belajar	16,100,000	-
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertamba	1	Ruang	1	Ruang	200,000,000	199,078,834
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2700	Peserta Didik	2700	Peserta Didik	300,000,000	295,141,200
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900	Orang	900	Orang	189,704,000	147,747,030
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	600	Paket	600	Paket	150,000,000	138,969,588
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	12	Paket	12	Paket	449,970,000	449,758,480
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah	1	Ruang	1	Ruang	50,000,000	49,531,863

		Direhabilitasi Sedang/Berat						
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	39,55	%	39,55	%	6,369,014,600	6,071,701,690
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	575	Orang	575	Orang	318,000,000	139,600,000
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	16	Satuan Pendidikan	16	Satuan Pendidikan	5,710,100,000	5,699,044,500
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4	Dokumen	4	Dokumen	195,916,600	129,215,165
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	300	Paket	300	Paket	51,000,000	49,950,000
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	100	Orang	100	Orang	93,998,000	53,892,025

		Bidang Pendidikan yang dilaksanakan						
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik yang bersertifikat	0	%	0	%	92,171,100	84,035,591
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik yang Bersertifikat	0	orang	0	orang	92,171,100	84,035,591
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	Dokumen	2	Dokumen	71,721,100	66,765,416
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2	Laporan	2	Laporan	20,450,000	17,270,175
	JUMLAH						683,087,376,940	663,238,410,101

BAB IV

PENUTUP

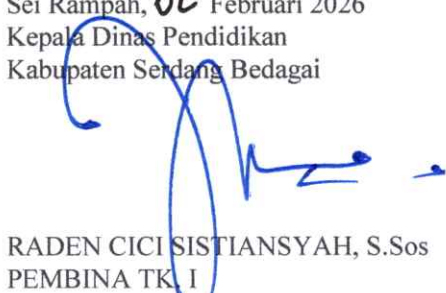
Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Pendidikan sebagai salah satu entitas akuntabilitas Dinas Pendidikan dalam mempertanggung jawabkan terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan yang didanai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai 2025 dalam pencapaian misi yang telah ditetapkan melalui keberhasilan atas pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Pendidikan. Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan-kegiatan utama maupun pendukung untuk tercapainya sasaran strategis.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 diharapkan dapat digunakan sebagai media yang memberi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang kinerja yang telah dicapai sebagai bahan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan pada tahun berikutnya serta penyempurnaan atas kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 ini disusun masih belum sempurna dan untuk itu kami menerima masukan, arahan dan bimbingan dari Bapak / Ibu demi perbaikan laporan ini.

Demikian laporan ini kami susun atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih

Sei Rampah, 02 Februari 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai



RADEN CICI SISTIANSYAH, S.Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19820826 200606 1 006